

KEARIFAN LOKAL DAN PERAN ELIT AGAMA DALAM MITIGASI BENCANA DI KECAMATAN TANGSE KABUPATEN PIDIE

Muhammad Sahlan

Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh
sahlan.hanafiah@gmail.com

Abstract

Knowledge about disasters has not been part of the local wisdom of society even though disasters have occurred many times. Every disaster happens as if always be something new. For this reason, this study aims to discuss local wisdom and the role of religious elites in disaster mitigation in Tangse, Pidie District. Because of the involvement of religious elites in the context of Acehnese people's still very important. Local wisdom of the community that should be a fortress, in fact, has first drowned and died because the local wisdom routinization has never run. Religious advice offered regarding forest and environmental conservation has lost its meaning because other people's economic alternatives have not been available. This condition is getting worse because people who are expected to be a fortress to prevent illegal logging are part of the activity. Finally, the religious elite as a strategic group also trapped in a circle of "timber economy" that invites disaster.

Keywords: Disasters, Local Wisdom, Elite Religion, Tangse District

Abstrak

Pengetahuan tentang bencana seringkali belum menjadi bagian bersemayam dalam kehidupan masyarakat meski bencana tersebut telah datang silih berganti. Setiap terjadi bencana, seakan-akan selalu menjadi sesuatu yang baru. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan tentang kearifan lokal serta peran elit agama dalam mitigasi bencana di Tangse Kabupaten Pidie, mengingat keterlibatan elit agama dalam konteks kehidupan masyarakat Aceh yang masih sangat penting. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik dan tsunami menjadi dua peristiwa dominan yang mengubah pola mata pencaharian masyarakat Tangse yang kemudian melahirkan pola pikir instan, sekaligus membuat masyarakat sulit keluar dari aktivitas penebangan liar yang melahirkan bencana. Kearifan lokal masyarakat yang seharusnya dapat menjadi benteng malah sudah terlebih dahulu tenggelam dan mati karena rutinisasi kearifan lokal sudah tak pernah dijalankan. Demikian pula dengan eksistensi elit agama dalam masyarakat menjadi sangat lemah dan lumpuh ketika berhadapan dengan aktivitas penebangan liar karena "berkah ekonomi" juga dinikmati oleh mereka.

Petuah-petuah keagamaan yang disamapaikan terkait pelestarian hutan dan lingkungan menjadi kehilangan makna, karena alternatif ekonomi masyarakat yang lain memang belum tersedia. Kondisi ini menjadi semakin parah karena orang-orang yang diharapkan menjadi benteng untuk mencegah pelepasan liar malah menjadi bagian dari aktivitas tersebut. Akhirnya elit agama sebagai kelompok strategis juga ikut terjebak dalam lingkaran “ekonomi kayu” yang mengundang datangnya bencana.

Kata Kunci: *Bencana, Kearifan Lokal, Elit Agama, Kecamatan Tangse*

Pendahuluan

Tangse adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Pidie yang berada di kawasan pegunungan Pidie, berjarak sekitar 190 km dari Kota Banda Aceh, Ibukota Provinsi Aceh. Letaknya yang sangat strategis dan dengan kekayaan alam yang melimpah, membuat Tangse pernah menjadi daerah yang paling makmur di Aceh pada masa lalu. Namun, sejak tahun 2011 hingga kini, daerah ini telah berubah menjadi kawasan bencana. Hampir setiap tahun bencana datang menghampiri masyarakat dari tanah longsor hingga banjir bandang (Lihat; Junaidi Hanafiah, 2015. “Tangse yang Kini Akrab Bencana”).

Meski Tangse kini telah menjadi “langganan bencana”, namun pengetahuan tentang bencana seolah belum menjadi bagian dari *local wisdom* yang bersemayam dalam kehidupan masyarakat. Setiap bencana yang datang, seakan-akan itu selalu menjadi sesuatu yang baru. Irwan Abdullah mengakui bahwa secara akademik, pengkajian tentang bencana masih sangat langka dan miskin sehingga setiap bencana yang terjadi selalu dianggap sebagai sebuah pengalaman baru dan ditanggapi sebagai sesuatu yang seakan-akan belum memiliki pengetahuan dan pengalaman kolektif tentang itu (Irwan Abdullah, 2006). Padahal, kejadian bencana sejatinya telah mengungkap esensi dan rahasia tentang kelemahan dan kekuatan tersembunyi dalam masyarakat, yang dalam situasi “normal” tertutup oleh sistem dan struktur yang membungkusnya (Humaedi, 2015: 213). Ketika bencana yang sama terjadi dan datang silih

berganti, idealnya masyarakat kawasan bencana memiliki pengetahuan, baik itu refleksi dari pengalaman maupun kajian-kajian yang bersifat saintis sehingga bisa menjadi *early warning* untuk meminimalisir dampak bencana, bahkan kehadiran bencana itu sendiri. Masyarakat bisa berkaca dan belajar dari pengalaman masa lalu. Makna teoritis pembelajaran ini menjadi penting mengingat manusia pada hakikatnya sebagai *animal historicum* yang terus bergelut dalam historisitasnya.

Dalam konteks Aceh, keterlibatan elit agama dalam kehidupan masyarakat Aceh secara kultural masih menjadi *center of social* yang memiliki *informal power* yang tersebar sebagai kekuatan penyeimbang dalam struktur masyarakat. Ulama dalam tatanan sosial di Aceh adalah kaum yang masih dilirik sebagai salah satu kelompok strategis, baik itu pada keputusan-keputusan politik, sosial maupun dalam hal kebudayaan. Kemampuan elit agama dalam menguasai ilmu agama menjadi basis legitimasi untuk menjadikan mereka solusi atas berbagai permasalahan keummatan. Namun, kurangnya implementasi sosial melalui panggung-panggung ceramah maupun moment keagamaan lainnya sebagai upaya penyadaran manusia akan pentingnya menjaga lingkungan diduga menjadi salah satu faktor penyebab maraknya dan tingginya intensitas bencana di bumi Tangse terkhusus, dan Aceh pada umumnya.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran elit agama dalam mitigasi bencana yang terjadi di dalam masyarakat Tangse. Disamping itu, artikel ini juga ingin melihat bagaimana kearifan lokal yang berupa hukum adat pada masyarakat rawan bencana “berbicara” tentang mitigasi bencana. Dengan memenuhi tujuan-tujuan itu, maka penelitian ini diharapkan bisa menambah perspektif kajian kebencanaan, baik secara teoritis, maupun praktis.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan mengeksplorasi suatu kenyataan sosial secara natural. Jenis penelitian ini

menempatkan obyek penelitian sebagai subjek aktif yang berada dalam lingkungan natural dan diupayakan untuk dideskripsikan secara timbal-balik dengan *thick description* (Koentjaraningrat. 1991:87; Sanapiah Faisal, 1989: 18). Sebagaimana karakter penelitian kualitatif, peneliti akan menjadi instrumen kunci dan bersifat utama dalam proses pengumpulan data. Peneliti akan berada di dalam wacana dimana produksi terhadap makna berlangsung, artinya peneliti secara *intens* akan berada dalam lingkungan dan kehidupan masyarakat yang diteliti.

Beberapa teknik pengumpulan data peneliti gunakan yaitu kajian literatur, dokumentasi, observasi partisipasi, diskusi grup terfokus dan wawancara mendalam. Setelah semua data dikumpulkan melalui berbagai teknik pengumpulan data seperti diatas, maka analisa data akan dilakukan secara induktif dimana para peneliti membangun pola-pola, kategori-kategori dan tema- temanya dari bawah ke atas, dengan mengolah data ke dalam unit-unit informasi yang lebih abstrak. Pada akhirnya, penelitian ini akan menghasilkan sebuah gambaran yang kompleks dari suatu masalah atau isu yang diteliti (Creswell, 2010: 261-263).

Pembahasan

Tangse dan Dinamika Sosial Masyarakat

Tangse is a dreaming land, begitulah kalimat yang cocok untuk menggambarkan daerah ini. Kecamatan Tangse bagai kota eksotis yang dikelilingi oleh perbukitan dan aliran sungai yang jernih membuat siapapun yang berkunjung ke daerah ini merasa ketagihan. Tanahnya yang subur, udaranya yang sejuk dan pemandangannya yang indah sangat memanjakan mata dan memberikan nilai tersendiri bagi mereka penikmat keindahan alam. Wilayah administrasi Kecamatan Tangse berbatasan dengan Kecamatan Keumala di sisi utara, Aceh Barat di sebelah selatan, Aceh Besar dibagian Barat dan Kecamatan Mane di sisi timur. Luas wilayahnya ± 750 KM² dengan jumlah Penduduk 26.235 jiwa, terdiri dari 4 mukim, 28 gampong dan berada di atas ketinggian 600-1200 mdpl (Tangse dalam Angka, 2017).

Sejak dulu Tangse telah terkenal sebagai daerah penghasil beras terlezat di Aceh, aromanya yang wangi dan teksturnya yang pulen membuat beras Tangse menjadi komoditas utama masyarakat kala itu. Namun kisah itu kini seolah tinggal kenangan, Tangse yang sempat menjadi primadona, saat ini lebih dikenal sebagai daerah “langganan bencana”. Beras Tangse pun sudah tidak lagi diproduksi, yang tersisa hanya “merk”nya saja. Sebagian besar masyarakat kini sudah mulai meninggalkan arena pertanian yang dulu sempat membuat Tangse menjadi primadona.

Pada masa konflik, daerah Tangse yang dikelilingi pegunungan serta kondisi hutan yang natural “menyediakan” banyak kayu menjadikannya sebagai daerah yang cukup banyak dijarah sekaligus sebagai tempat “transaksi” pada masa itu. *“Pada masa konflik Aparat dan GAM telah sama-sama memperkosa hutan, GAM yang tebang kayu, aparat yang beli”* (Wawancara, Oktober 2018), ujar seorang Imam Mukim dan sekaligus mantan anggota GAM Tangse. Belum lagi kondisi yang mencekam pada masa konflik sebagaimana daerah lainnya di Aceh, membuat aktivitas masyarakat menjadi sangat terbatas. Begitupula dengan masyarakat Tangse yang harus meninggalkan perkebunan mereka pada saat itu karena ketakutan akibat konflik yang terjadi. Masyarakat lebih memilih beraktivitas di area perkampungan saja. Sehingga mereka yang sebelumnya menggantungkan hidup dari perkebunan, pada masa konflik terpaksa harus meninggalkannya. Akibatnya perkebunan yang sempat menjadi salah satu sumber ekonomi masyarakat berubah menjadi hutan dan semak belukar (Hasil wawancara dengan Imam Mukim Layan, Oktober 2018).

Setelah konflik usai dan kondisi Aceh semakin kondusif, masyarakat tidak lagi kembali ke perkebunan yang dulu pernah mereka kerjakan karena akses menuju perkebunan yang ada di kawasan hutan telah rusak. Terlebih lagi, pasca tsunami geliat pembangunan di Aceh meningkat, permintaan kayu untuk pembangunan pun semakin meningkat pula. Kondisi ini mendorong masyarakat Tangse untuk melakukan penebangan kayu di kawasan hutang Tangse karena sangat menguntungkan dan membawa berkah ekonomi secara

instan. Dampaknya, terjadi penebangan liar secara massif dan hal ini secara perlahan mengubah pola mata pencaharian masyarakat serta membuat hutan-hutan yang ada menjadi gundul. Singkatnya, ekonomi kayu yang menjanjikan pasca tsunami secara perlahan berhasil mengubah pola mata pencaharian masyarakat.

Kini, sebagian besar masyarakat masih menggantungkan hidupnya pada kayu yang ada di hutang Tangse meskipun sebagian besar hutan Tangse adalah kawasan lindung, sehingga tetapi kehancurannya menjadi tidak terelakkan. Masyarakat sudah terlanjur menikmati mudahnya mendapat uang dari menjual kayu, sehingga cukup sulit untuk kembali ke lahan pertanian. Jika pun kembali, pertanian itu bukan lagi yang utama. "*Saat ini kayu adalah sumber ekonomi utama masyarakat*" tutur salah seorang Geuchik (Kepala Desa). Lahan pertanian dan perkebunan memang masih tersedia, namun kayu dianggap jauh lebih menjanjikan karena dapat diperoleh dengan cepat. Sedangkan pertanian membutuhkan waktu yang relatif lebih lama, apalagi perkebunan yang aksesnya saja membutuhkan perjuangan. Akhirnya komoditas pertanian hanya dilirik sebagai sumber skunder dan kayu tetap menjadi sumber primer ekonomi masyarakat.

Perubahan demi perubahan yang terjadi secara pelan tapi pasti telah mengubah *landscape* kehidupan sosial masyarakat tangse. Hutan yang ada sudah tidak lagi dipandang sebagai anugerah tuhan yang harus terus di jaga dan dilindungi demi keselamatan hidup mereka. Terjadi perubahan cara pandang masyarakat dalam melihat hutan, yakni dari hutan sebagai ruang yang menjaga kehidupan dengan segala sumberdaya nabati, berubah menjadi ruang-ruang penyedia modal bagi produksi yang mereka pikirkan untuk terus di eksploitasi. Perubahan inilah yang kemudian melahirkan praktek *illegal logging* tanpa memperhatikan kearifan dan nilai-nilai lingkungan sehingga bencana pun menjadi langganan. Eksplorasi kayu yang terjadi telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Bahkan upaya-upaya tersebut sudah jauh dari kebiasaan yang pernah mereka praktikkan dahulu.

Bencana Tangse: Dulu dan Kini

Bencana banjir yang menimpa Kecamatan Tangse beberapa tahun terakhir bukanlah yang pertama kali terjadi. Berdasarkan penuturan salah seorang Mukim di Kecamatan Tangse, pada era tahun 1971, bencana banjir bandang pernah terjadi di Kecamatan Tangse. Tetapi, bencana tersebut tidak sampai menelan korban ataupun merusak infrastruktur yang ada. Kehidupan masyarakat Tangse yang dekat dengan alam dan lingkungan kala itu membuat banjir bandang yang datang tidak menjadi musibah yang berarti. Mata pencaharian masyarakat yang mayoritas bertani membuat aliran sungai menjadi salah satu sumber utama aktivitas pertanian. Selain sebagai sumber pengairan dan irigasi, masyarakat Tangse juga menjadikan aliran sungai sebagai salah satu sumber teknologi pengolahan hasil panen secara tradisional. Ketika terjadi banjir, laju air yang datang berhasil dihambat oleh banyaknya kincir-kincir yang ada disepanjang aliran sungai tersebut, sehingga banjir yang pernah terjadi pada masa lalu tidak berubah menjadi bencana bagi masyarakat. Kini, mesin peralatan pertanian padi modern telah menggantikan teknologi klasik tradisional yang pernah dipraktekkan masyarakat Tangse dalam mengolah hasil panen mereka. Imam Mukim Layan mengatakan *“sekarang kincir sudah tidak ada lagi, orang sekarang giling padi tidak susah seperti dulu. Sudah banyak mesin giling padi, malah sudah sampai kerumah-rumah”*.

Beralihnya perhatian masyarakat dari aliran sungai akibat perubahan alat produksi secara sistematis mengalihkan perhatian masyarakat dari sungai itu sendiri. Ketika peralatan pertanian tradisional masih dominan digunakan, hampir setiap hari masyarakat bersinggungan dengan aliran sungai sehingga sampah kecil maupun besar yang mengganggu aliran sungai akan cepat dibersihkan. Namun saat ini peralatan pertanian modern telah “mengasingkan” perhatian masyarakat sehingga aliran sungai pun sudah tak seperti dulu lagi. Sampah-sampah kayu bertumpukan, limbah hasil penebakan liar menyumbat aliran dan pendangkalan pun terjadi. Ketika hujan turun deras, volume air bertambah, sampah kayu hasil penebangan terseret air dan akhirnya menghantam perumahan dan persawahan yang ada di sekelilingnya. Hingga menyeret Tangse

tenggelam dan berubah menjadi kawasan rawan bencana. Jika pada masa lalu bencana banjir bandang yang terjadi tidak begitu merugikan atau bahkan tidak dipandang sebagai bencana, tapi kini peristiwa banjir telah menjadi petaka bagi masyarakat. “*Tiada tahun tanpa bencana, tiada tahun tanpa banjir*”, demikian penuturan Tokoh Masyarakat Gampong Peunalom II.

Mitigasi Bencana di Kecamatan Tangse

Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 4 tahun 2008, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Salah satu elemen yang menjadi kunci dari pencegahan bencana adalah pemerintah daerah melalui aturan yang jelas terkait tata ruang wilayah. Dalam konteks ini, rencana pola ruang yang dirumuskan oleh pemerintah Kabupaten Pidie sebetulnya telah secara tegas mengklasifikasikan pola tata ruang dan wilayah yang ada, termasuk tata ruang dan wilayah untuk Kecamatan Tangse (Yamani dkk, 2015). Peraturan ini pada tataran implementasinya masih ditemukan kelemahan, terutama dalam hal penindakan atau penegakan hukum. Kawasan hutan lindung dan konservasi sebagai kawasan yang harus steril dari aktivitas penebangan liar, pada kenyataannya tidak demikian karena ternyata masih terjadi penebangan liar secara massif. Pada tahun 2012, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pidie, Ir M Hasan Yahya, menyebutkan lebih kurang 500 hektare kawasan hutan lindung di Kecamatan Tangse telah rusak akibat maraknya penebangan liar. Ia menambahkan bahwa dari luas keseluruhan hutan lindung Tangse 54.729 hektare, kini sudah mencapai 500 hektare yang telah gundul karena terus-terusan ditebang” (Lihat, Serambinews.com. “500 Hektare Hutan Lindung di Tangse Rusak”).

Secara normatif, mitigasi bencana dilakukan secara terus menerus oleh pihak pemerintah melalui BPBD Pidie maupun BNPB dengan turut melibatkan unsur-unsur lokal seperti LSM, pemerintah Gampong dan tokoh-tokoh setempat. Pemerintah melalui BPBD dan BNPB telah melakukan serangkaian sosialisasi

tentang mitigasi bencana. Sosialisasi tersebut dilakukan disekolah dan beberapa tempat atau daerah yang rawan maupun terdampak bencana. Bahkan papan-papan pengumuman tentang pentingnya menjaga hutan, menghentikan penebangan liar serta jalur-jalur evakuasi ketika bencana datang merupakan “objek” yang sangat mudah kita temui di sepanjang jalan di Kecamatan Tangse. Papan-papan pengumuman, himbauan dan arah ataupun rute evakuasi bencana sudah dapat kita lihat sejak memasuki perbatasan Kecamatan Tangse. Tetapi himbauan-himbau tentang bahaya menebang pohon ataupun dampak kerusakan alam bagi hanya menjadi plakat-plakat yang kehilangan makna. Karena dibelakang itu, aktivitas penebangan masih berlangsung dan bahkan didukung oleh “oknum-oknum” yang harusnya massif mengkampanyekan bahaya *illegal logging* bagi masyarakat. Selain itu, ada pula upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah datangnya bencana, yaitu dengan melakukan razia kepada para penebang liar. Namun menurut pengakuan beberapa responden, aksi razia yang dilakukan oleh pihak terkait terkesan tidak serius. Karena sebelum razia dilakukan, informasi terkait titik razia sudah menyebar kepada masyarakat dan tentunya para penebang kayu juga sudah mengetahuinya.

Komitmen pemerintah dan aparat pada tataran implementasi kebijakan yang lemah kemudian melahirkan respon negatif masyarakat terhadap pemerintah terkait aktivitas penebangan liar yang terjadi. Dalam survey yang dilakukan oleh Mujani (2016) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat Kecamatan Tangse dalam menjaga hutan berada pada kategori rendah, penanggulangan *illegal logging* pun masih belum memadai karena belum adanya program yang nyata serta sanksi bagi para pelaku *illegal logging* di Kecamatan Tangse tersebut. Belum lagi penegakan hukum yang lemah membuat aktivitas penebangan liar semakin menjadi-jadi. Bahkan, penebangan liar yang melibatkan oknum aparat penegak hukum telah menjadi rahasia umum bagi masyarakat Tangse. “Tidak jarang pelaku-pelaku *illegal logging* tersebut di *support* oleh oknum-oknum tertentu sehingga aktivitas penebangan berjalan

dengan lancar dari proses penebangan hingga distribusinya” ungkap beberapa responden.

Dengan kondisi yang demikian, mitigasi bencana sebagai suatu upaya mengurangi resiko bencana di Kecamatan Tangse yang di inisiasi oleh pemerintah maupun masyarakat setempat menjadi kehilangan substansinya. Pada akhirnya mitigasi bencana tidak menjadi serangkaian upaya sistematis untuk menanggulangi resiko bencana yang pada ujung-ujungnya dapat menghilangkan datangnya bencana tersebut. “Proyek penyadaran” kepada para korban bencana pun sia-sia karena aktivitas pengundang bencana terus dilakukan “secara berjamaah”. Mitigasi bencana berubah menjadi rutinitas tahunan dan lebih menjadi tanggap darurat yang bermuatan ekonomis dimana bencana dianggap sebagai suatu “berkah” tersendiri. Jika terjadi bencana berarti bantuan akan datang, jika bantuan datang, berarti “proyek” tanggap darurat bencana siap dijalankan. “*Kalau sudah banjir di Tangse, tinggal kontek kantor; nyo ka banjir, peng jalan ka na*”, ujar salah seorang anggota Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Pidie.

Kearifan Lokal dan Peran Elit Agama

Berdasarkan FGD dan wawancara mendalam yang dilakukan, ditemukan bahwa pada masa lalu pernah hidup suatu pengetahuan lokal yang bijaksana berkaitan dengan hubungan manusia dan hutan yang ada di Kecamatan Tangse. Salah seorang tetua Gampong layan dalam satu kesempatan FGD yang dilakukan mencoba mengingat kembali petuah-petuah lama atau syair yang dulu selalu dituturkan oleh para orang tua mereka dalam konteks berinteraksi dengan alam dan hutan. Namun apa daya, ingatan itu telah hilang dari benaknya. Beliau menceritakan bahwa dulu sering disampaikan kepada mereka dimasa muda pepatah aceh atau yang lebih dikenal dengan sebutan hadih maja itu. “*dulu ada, banyak syair atau hadis maja tentang, menjaga lingkungan dan hutan, sebentar ya, saya ingat-ingat dulu... wah sudah gak ingat lagi*” tutur Teungku Abu Bakar.

Hilangnya pengetahuan masyarakat terkait kearifan lokal tentang menjaga lingkungan hingga seorang tetua kampung pun tidak mampu mengingatnya lagi, mengindikasikan bahwa kearifan lokal itu benar-benar sudah tenggelam dan mati. Masyarakat Tangse sudah tidak pernah lagi mempraktekkan budaya bertutur untuk melanggengkan kearifan lokal yang dulu mereka ketahui dan praktekkan. Jika sekelas tetua kampung saja sudah tidak ingat, apalagi generasi muda. Maka tidak berlebihan kemudian jika dikatakan bahwa kearifan lokal di Tangse sebetulnya telah tenggelam dan itu terjadi karena rutinisasi kearifan lokal sudah tak pernah dijalankan dan aksi refleksi pun tak pernah ada.

Selain kearifan lokal dalam tutur, ketua Mukim Layan juga menyampaikan bahwa pada masa lalu, hukum adat yang berbicara tentang pelestarian hutan demi mencegah hadirnya bencana dalam masyarakat juga menjadi pengetahuan yang hidup dalam masyarakat. Kearifan lokal tersebut berbentuk norma adat tentang larangan menebang kayu sembarangan, karena sejak dulu sebenarnya masyarakat telah menyadari bahwa penebangan hutan akan mengundang bencana. Norma adat atau kearifan lokal tersebut adalah larangan menebang kayu 200 depa dari bibir sungai dan 50 depa dari lereng gunung. Menurut kepala Mukim Layan, larangan ini tercantum pada hukum adat masa lalu. Sehingga pernah suatu ketika, unsur adat, elit agama dan tokoh masyarakat membuat *draf* dan kesepakatan bersama terkait larangan menebang pohon yang bersumber dari hukum adat tersebut. Tetapi kesepakatan bersama yang di inisiasi oleh unsur adat dan elit agama tersebut tidak pernah dijalankan dan draft yang mereka susun tidak mendapat respon positif dari pemangku kebijakan. Akhirnya kearifan lokal tentang larangan menebang pohon sembarangan tersebut kini juga hanya menjadi kenangan.

Selanjutnya, terkait dengan peran elit agama, dalam konteks masyarakat Tangse pada dasarnya elit agama atau *Teungku* secara kultural masih dapat diidentifikasi sebagai kelompok strategis yang masuk dalam kategori elit sublimatif. Kemampuan elit agama Tangse dalam bidang agama membuat

legitimasi mereka secara kultural masih diakui oleh masyarakat secara umum. Mimbar-mimbar pengajian dan moment keagamaan masih didominasi oleh peran elit agama lokal atau *Teungku* dayah yang ada di Kecamatan Tangse. Bahkan setiap Gampong yang ada di Kecamatan Tangse terdapat dayah yang dipimpin oleh seorang *Teungku* tempat masyarakat menimba ilmu agama. Otoritas kultural yang dimiliki oleh elit agama sebagai kelompok strategis sangat berperan dalam denyut nadi masyarakat Tangse. Jika warga Tangse ditanya siapa ulama yang dihormati di Gampong ini, mereka akan menjawab *Teungku* dayah, demikian pula elit integratif yang ada seperti aparat pemerintah yang juga mengatakan bahwa *Teungku* dayah adalah orang yang dihormati (Hasil FGD, September 2018).

Sebagai kelompok strategis, elit agama di Tangse sebenarnya sudah melakukan beberapa langkah dan upaya dalam hal mencegah terjadinya bencana. Beberapa peran yang sudah dilakukan oleh elit agama terkait dengan upaya pencegahan bencana adalah bekerjasama dengan ketua adat setempat dan tokoh masyarakat dalam merumuskan kesepakatan bersama terkait dengan penebangan hutan. Sebagaimana dijelaskan oleh Fakhruddin Umar:

“Menyangkut dengan masalah agama, hukum adat ada yang berbicara untuk mencegah bencana. Jadi waktu itu ada kami buat draf yang diketuai oleh imam mukim. Draft qanun tentang masalah penebangan kayu di hulu sungai yang mengacu pada hukum di masa lalu. Jadi aturan itu sudah kami buat bersama-sama, tapi setelah kami ajukan aturan itu, di DPR aturan itu jadi tidak jelas dan tidak ditindak lanjuti”(Wawancara dengan Bapak Fachrudin Umar, Oktober 2018)

Selain merancang qanun, peran lainnya yang dimainkan oleh elit agama adalah memberikan teguran pada para penebang liar di pegunungan Tangse, membahasnya dalam mimbar-mimbar khutbah dan memasukkan materi pemahaman bencana dalam pengajian-pengajian. Namun hal itu masih direspon negatif oleh masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya posisi struktural mereka di masyarakat dan lemahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Selain itu, sirkulasi ekonomi yang mendukung terlaksananya kegiatan keagamaan yang dipimpin oleh para ulama juga masih

bersumber dari aktivitas-aktivitas penebangan liar. Kondisi ini semakin melemahkan otoritas ulama saat berhadapan dengan isu penebangan liar. *“Peran kami sebagai pemangku adat dan agama sudah mengusahakan tapi adat tidak didengar, apa yang kami bilang tidak didengar. Adat tidak ada kekuatan hukumnya, tidak ada penjara kalau melanggar hukum adat, denda pun sudah tida didengar sekarang”*, kata salah satu elit agama lokal di Tangse.

Meskipun demikian, dalam aspek sosial keagamaan elit agama masih menjadi referensi utama masyarakat, hal itu dapat dilihat dalam beberapa kegiatan yang ada dalam masyarakat di mana kaum ulama tetap menjadi aktor utama dalam kegiatan tersebut seperti dalam acara pernikahan, acara adat, kematian dan sosia keagamaan lainnya. Tetapi jika terkait dengan penebangan hutan yang secara pasti mengundang akan datangnya bencana, petuah-petuah keagamaan masih belum didengarkan oleh masyarakat. Alasan ekonomi masih menjadi narasi utama yang membuat petuah keagamaan dari para elit agama tidak dilaksanakan oleh masyarakat. Perekonomian masyarakat yang masih sangat tergantung pada hutan dan kayu serta belum ada alternatif lain sebagai penggantinya, “memaksa” masyarakat untuk melakukan penebangan liar demi memenuhi kebutuhan sehari-hari meskipun aktivitas itu membahayakan hidup mereka sendiri. Salah seorang elit pemerintah menceritakan;

“Contoh Gampong Blang Pandak, sekarang tidak ada lagi yang mau bertani, khusus mereka menebang kayu padahal resikonya tinggi, tahun kemarin (2017) ada 2 orang meninggal tertimpa pohon kayu, memang itu resiko, tapi hari ini meninggal, belum genap tujuh hari sudah ke hutan lagi”(Hasil FGD bersama Pemerintah Gampong, September 2018)

Bukan hanya warga biasa, para elit lokal juga terlibat di dalamnya, tak terkecuali oknum elit agama yang ikut terseret dalam “lingkaran setan” tersebut. Dalam konteks ini, keterlibatan elit agama bisa didapatkan dalam dua jenis; pertama sebagai aktor yang melakukan penebangan dan kedua sebagai pihak yang merasakan hasil dari penebangan itu. *“Bagaimana (ulama) mau melarang kami motong kayu, kalau warga tidak potong kayu, maka tidak ada uang masuk. Kalau tidak ada uang, bagaimana kami mau menyumbang untuk*

keberlangsungan kehidupan dayah..." ungkap salah seorang tokoh masyarakat Gampong Peunalom I.

Apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat tersebut menggambarkan ada semacam ikatan yang sulit untuk dihindari. Pekerjaan warga sebagai penebang atau hanya sebagai pengangkut kayu hasil tebang illegal menjadi sumber pendapatan yang menggerakkan roda perekonomian. Uang yang didapatkan kemudian didistribusikan untuk keperluan sehari-hari, misalnya untuk biaya pendidikan anak-anaknya yang mengaji di dayah atau pesantren. Bukan hanya itu, warga juga menyumbang untuk biaya operasional dayah agar lembaga pendidikan informal tersebut terus bisa berjalan. Kondisi ini secara tidak langsung sangat membatasi peran ulama untuk berbicara bahwa penebangan yang dilakukan secara illegal adalah perbuatan terlarang karena mendatangkan mudharat bagi masyarakat.

Kala dominasi elit agama hanya bertumpu pada kemampuan politik dan kultural tanpa ditopang dominasi secara ekonomi, maka implikasinya adalah terjadi resistensi di kalangan agensi jika ada pihak otoritas agama yang melarang penebangan liar. Resistensi yang dihadirkan bisa dalam bentuk sangat sederhana, yaitu masyarakat hanya pura-pura mendengar ketika berhadapan langsung dengan pihak yang memiliki otoritas, namun tidak mematuhi larangan-larangan disampaikan. Selain dari faktor di atas, perlawanan semacam ini bisa terjadi karena masyarakat menganggap bahwa hutan yang mereka tebang adalah basis material yang sebenarnya memang hak mereka. Anggapan ini terjadi karena ekosistem hutan itu berada dalam wilayah yang menjadi tempat tinggal mereka.

Jika ditarik lebih jauh, melemahnya otoritas elit agama dalam kehidupan masyarakat Aceh saat ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran peran dan sakralitas elit agama dalam masyarakat Aceh. Terutama pasca konflik dan tsunami dimana kaum elit agama atau ulama tidak lagi mampu memainkan otoritas layaknya Aceh pada masa lalu. Dalam konteks Aceh secara umum, perubahan dalam sistem kekuasaan dan tata pemerintahan sejak Aceh bergabung dalam Negara kesatuan Republik Indonesia menjadi alasan utama lahirnya

kondisi tersebut. Kedua, pelembagaan yang terjadi di kalangan ulama sendiri, misalnya HUDA (Himpunan Ulama Dayah Aceh), MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama), dan MUNA (Majelis Ulama Nanggroe Aceh), di mana masing-masing lembaga tersebut mengklaim diri sebagai kelompok yang selayaknya disebut "ulama". Ketiga, adanya kontestasi peran ulama di Aceh. Tarik ulur kepentingan di kalangan internal ulama menjadi faktor penting akan hilangnya legitimasi dan kekuatan peran ulama secara umum di masyarakat saat ini.

Penutup

Kondisi konflik dan bencana tsunami yang terjadi di Aceh secara sosiologis menjadi salah satu penyebab lahirnya bencana yang terus menerus di kecamatan Tangse. Konflik dan Tsunami menjadi dua peristiwa dominan yang mengubah pola mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Tangse. Peristiwa tersebut telah melahirkan pola pikir instan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga membuat masyarakat sulit keluar dari aktivitas penebangan liar yang menciptakan efek mata rantai ekonomi dan membawa berkah bagi geliat perekonomian masyarakat meski resiko bencana yang kemudian diterima akibat aktivitas tersebut jauh lebih besar.

Kearifan lokal masyarakat yang seharusnya dapat menjadi benteng malah sudah terlebih dahulu tenggelam. Kearifan lokal di Tangse tenggelam dan mati karena rutinisasi kearifan lokal sudah tak pernah dijalankan dan aksi refleksi pun tak pernah ada. Akhirnya kearifan lokal tentang larangan menebang pohong sembarangan serta budaya tutur yang dulu pernah menjadi "kompas" masyarakat dalam memperlakukan alam kini hanya menjadi kenangan. Demikian pula dengan eksistensi elit agama sebagai agen sosial. Ketika elit agama berhadapan dengan aktivitas penebangan liar yang mengundang bencana, otoritas yang mereka miliki menjadi sangat lemah karena "berkah" ekonomi juga dinikmati oleh mereka. Petuah-petuah keagamaan yang mereka samapaikan terkait pelestarian hutan dan lingkungan menjadi kehilangan makna, karena alternatif ekonomi masyarakat yang lain memang belum tersedia.

Hal ini menjadi semakin parah karena orang-orang yang diharapkan menjadi benteng untuk mencegah pekebangan liar malah menjadi bagian dari aktivitas tersebut. Akhirnya elit agama sebagai kelompok strategis juga ikut terjebak dalam lingkaran “ekonomi kayu” tersebut.

Terakhir, proses mitigasi bencana belum dilakukan secara komprehensif, yang terjadi selama ini hanya terkait pada tanggap darurat paska bencana, sedangkan respon terhadap sumber bencana masih terabaikan. Padahal mitigasi bencana juga seharusnya terkait dengan upaya terstruktur dan sistematis dengan memanfaatkan aktor lokal yang potensial untuk melakukan rekayasa sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk keluar dari “lingkaran ekonomi kayu” yang menjebak masyarakat Tangse masuk dalam pusaran bencana, selain penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penebangan liar dan aktor-aktor atau oknum yang terlibat, juga diperlukan intervensi dan perhatian serius dari pemerintah untuk mendampingi dan memberdayakan masyarakat dengan cara memaksimalkan potensi-potensi yang ada seperti; perkebunan, perikanan dan palawija sebagai alternatif perekonomian masyarakat. Dan hal ini tentunya dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap melibatkan aktor lokal yang potensial.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan. 2006. *Dialektika Natur, Kultur, dan Struktur: Analisis Konteks, Proses, dan Ranah dalam Konstruksi Bencana*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Antropologi Pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada pada tanggal 13 November 2006.
- Achmad Yamani, Ernan Rustiadi, Widiatmaka. 2015. "Evaluasi Pola Ruang Berbasis Kerawanan Banjir di Kabupaten Pidie". *Tata Loka*, 17(3): 130-146
- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Daeng, Hans J. 2012. *Manggarai Daerah Sengketa Antara Bima dan Goa, dalam Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan; Tinjauan Antropologis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faisal, Sanapiah. 1989. *Fotmat-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali.
- Hanafiah, Junaidi. 2015. "Tangse yang Kini Akrab Bencana". Diakses pada tanggal 25 September 2017 dari situs: <http://www.mongabay.co.id/2015/12/20/Tangse-yang-kini-akrab-bencana/>.
- Humaedi, M. Alie. "Disaster Management Based on The Perspective of InterReligious Connection and Local Wisdom". *Analisa Journal of Social Science and Religion*. 22(2)
- Kecamatan Tangse dalam Angka tahun 2017. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie. Diakses dari situs: <https://pidiekab.bps.go.id/publication/2017/09/20/454d93edc58d82d0fb8da3cc/kecamatan-tangse-dalam-angka-2017.html>
- Koentjaraningrat. 1991. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sartini. 2004. "Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafat". *Jurnal Filsafat*, 37: 111-120.
- Serambinews.com. "500 Hektare Hutan Lindung di Tangse Rusak". Diakses pada oktober 2018 dari situs: <http://aceh.tribunnews.com/2012/03/06/500-hektare-hutan-lindung-di-Tangse-rusak>